

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridhonya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Renja SKPD berdasarkan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten dan usulan dari masyarakat khususnya bidang kesejahteraan sosial .

Dengan tersusunnya Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2021 bidang kesejahteraan sosial yang nantinya dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. Kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur,

Demikian semoga Rencana Kerja ini dapat di pergunakan sebagai perencanaan Program SKPD kedepan, terimakasih

Maba, 3 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Timur



[Handwritten Signature]

NURAIN KOMDAN, SE

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19641016 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur dan Capaian Renstra	4
2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	5
2.3	
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur	6
2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur	7
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial, Kabupaten Halmahera Timur	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	7
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur	7
3.3 Program dan Kegiatan	8
BAB IV PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUAD dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Thn 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor ... Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 – 2021

1.3. Maksud dan tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah. Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 ditetapkan dengan maksud :

1. Menyediaan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) rentang rencana pembangunan tahunan.
4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2017-2022. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022
 - 2.1 Evaluasi Capaian Renstra dan Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan
 - 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
 - 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Capaian Renstra dan Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Renja Tahun 2021 terdiri dari 6 Program dan 26 Kegiatan. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 memang berbeda dengan rancangan yang ada pada Renstra Dinas Sosial, hal ini dikarenakan munculnya program-program inovatif dan kegiatan baru di tahun 2021 yang memang dimunculkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kesejahteraan sosial. Selain itu, Dinas Sosial berada dalam masa transisi antara SKPD lama dan OPD baru yang mana terdapat penambahan jumlah Bidang yang tentunya diikuti dengan perubahan jumlah program dan kegiatan di tahun - tahun berikutnya. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Program Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5. Program Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Program/Uraian	Pagu	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target
1.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.040.000	40.040.000	100	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.040.000	40.040.000	100	35 Orang
2.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.871.048	423.871.048	100	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.773.000	5.773.000	100	12 Bulan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.025.278	6.025.278	100	12 Bulan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.951.370	42.951.370	100	12 Bulan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.741.400	5.741.400	100	12 Bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.750.000	42.750.000	100	12 Bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.630.000	320.630.000	100	12 Bulan
3.	Program Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.585.800	38.585.800	100	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.585.800	38.585.800	100	12 Bulan
4.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.289.103	14.289.103	100	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	6.300.000	100	500 Lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.989.103	7.989.103	100	12 Bulan

5.	Program Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.897.000	84.897.000	100	100 %
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	73.250.000	73.250.000	100	12 Bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.967.000	5.967.000	100	12 Bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.680.000	5.680.000	100	12 Bulan
6.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	127.242.300	127.242.300	100	100 %
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	102.692.300	102.692.300	100	1 Paket
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.550.000	24.550.000	100	1 Paket

2.3 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan. Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang social dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di bantu dan ditangani. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana teknis kegiatan di lapangan dan dimasukkan kedalam tabel pelaporan, maka dapat diberikan analisa kinerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100% dari total anggaran. Program ini memiliki 1 kegiatan.
2. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100 % dari total. anggaran. Program ini memiliki 6 kegiatan.
3. Program Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100% dari total anggaran. Program ini memiliki 1 kegiatan.
4. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100% dari total anggaran. Program ini memiliki 2 kegiatan.

5. Program Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100% dari total anggaran. Program ini memiliki 3 kegiatan.
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terealisasi 100% dari total anggaran. Program ini memiliki 2 kegiatan.

2.4 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu-isu penting Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya keterampilan PMKS.
2. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
3. Sering terjadinya bencana dalam satu tahun.
4. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi Alam dan kondisi geografis
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS.
6. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui sebagian jumlah PMKS secara akurat.
7. Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PMKS.
8. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
9. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial.
10. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1).
11. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non fisik karena bukan merupakan pembangunan infrastruktur maupun gedung yang bisa dirasakan langsung pemanfaatannya oleh masyarakat. Pada usulan perencanaan kegiatan tahun 2021, Dinas sosial telah menunggu hasil musyawarah rencana pembangunan kecamatan yang dilakukan di 10 kecamatan di kabupaten. Namun oleh karena Dinas Sosial bukan merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan secara fisik, maka tidak ditemukan usulan dari masyarakat yang bisa di tempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur memiliki tujuan dan sasaran OPD seperti yang tertuang dalam dokumen renstra 2017 – 2022 tujuan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022 adalah Menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Adapun sasaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022 ada dua, yaitu Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam program kesejahteraan sosial.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran
1	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS 2. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022 adalah Menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Adapun sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2022 ada dua, yaitu Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam program kesejahteraan sosial.

3.3 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD tahun 2021, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022.

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ANS
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**
 - a. Peningkatan Kapasitas Pendampingan KAT
- 8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
 - a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 10. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
 - a. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - b. Pemberian Layanan Rujukan
- 11. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	kode	Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Tahun 2021		Lokasi
						Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhihinya Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	1.450.738.464	Kota Maba
2	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian Dinas dan pakaian Olahraga	Terpenuhihinya peralatan pakaian hari-hari tertentu	40 Orang	72.600.000	Kota Maba
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Bantuan Kementrian Sosial	Jumlah Dana yang Dibutuhkan	Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Kemetrian Sosial	10 Kecamatan	134.850.715	10 Kecamatan
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen intalasi listrik/ penerangan listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen intalasi listrik/ penerangan listrik/penerangan bangunan kantor	Jumah komponen intalasi listrik/ penerangan listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	9.455.000	Kota Maba
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6.947.193	Kota Maba

	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Konsumsi Kudapan/Snek dan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	50.157.059	Kota Maba
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan penggandaan	Jumlah dokumen tercetak/fotocopy	Jumlah dokumen tercetak/fotocopy yang tersedia	12 Bulan	42.523.470	Kota Maba
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Kunjungan Tamu	Jumlah terlaksananya kunjungan tamu	12 Bulan	45.144.000	Kota Maba
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	12 Bulan	166.560.000	Kota Maba
4		Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2	Tersedianya Pemeliharaan untuk Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan untuk Kendaraan Dinas	12 Bulan	39.500.000	Kota Maba
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Barang Milik Daerah	Jumlah penyediaan barang milik Negara	Jumlah pengadaan barang peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	97.579.020	Kota Maba
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Surat – Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Materai 10000	Jumlah Materai yang tersedia	500 Lembar	6.750.000	Kota Maba
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	7.992.300	Kota Maba
6		Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan roda empat dan roda dua	Jumlah perizinan kendaraan roda empat dan roda dua yang tersedia	12 Bulan	39.500.000	Kota Maba
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabiliatsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabiliatsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	34.800.000	Kota Maba

	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	12 Bulan	8.470.000	Kota Maba
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
7		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						
	1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Pendataan Suku Tugutil	Peningkatan Pendataan Suku Tugutil	Peningkatan Pendataan Suku Tugutil	5 Kecamatan	131.725.000	5 Kecamatan
8		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sumber daya kapasitas tenaga kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat (PMKS)	Terciptanya komunikasi yang baik antara SDM PKH dengan Pemerintah Daerah	Jumlah terlaksananya peningkatan sumber daya kapasitas tenaga kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat (PMKS)	1 Paket	111.581.595	Kab. Haltim
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
9		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anaka Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis & Masyarakat	Jumlah Terlaksananya Koordiansi antara pihak korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pendamping Anak	1 Paket	191.849.600	Kab. Haltim
10		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						

	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tingkat Ketersediaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Paket	124.600.000	Kab. Haltim
	2	Pemberian Layanan Rujukan	Pendampingan Anak bermasalah dengan Hukum (ABH)	Jumlah Anak bermasalah dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya pendampingan Anak bermasalah dengan Hukum (ABH)	1 Paket	205.655.000	Kab. Haltim
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
11		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Infentarisasi dan Falidasi Data Miskin, Sembako dan PKH	Jumlah Infentarisasi dan Falidasi Data Miskin, Sembako dan PKH	Jumlah Terlaksananya Infentarisasi dan Falidasi Data Miskin, Sembako dan PKH	1 Paket	1.500.859.184	Kab. Haltim
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin	1 Paket	150.000.000	Kab. Haltim
		J U M L A H ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN					4.638.577.600	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Kabupaten Halmahera Timur selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Sosial disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing- masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut. Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2021

Maba, 3 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Timur

NURAIN KOMDAN, SE

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19641016 200112 2 001